

**RENCANA KERJA (RENJA) SKPD  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2019**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan dan Perundang-undangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah juga diperlukan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil pada Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan. Pada peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD dan RPJM. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021 yaitu : ***“Menjadi Pengawasan Internal yang Konsisten dan Tegas dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ”***



Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Inspektorat, misi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Meningkatkan koordinas Pengawasan
  - Meningkatkan perencanaan pengawasan.
  - Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
  - Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
- II. Meningkatkan Pengawasan
  - Menurunkan tingkat kesalahan.
  - Mengurangi tingkat penyelewengan.
  - Menertibkan tata kelola administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- III. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan
  - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang profesional.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
- m. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- n. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019.
2. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan
3. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,
- 3.3. Program dan Kegiatan,

#### **BAB IV PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2018, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

1. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Target Kinerja Hasil/keluaran</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	12 Bulan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	12 Bulan
Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
Pengadaan Meubeller	2 Paket
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	12 Bulan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	12 Bulan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100,00 %
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Auditor dan P2UPD	8 Orang



<b>Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler)	57 Obrik
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/khusus)	12 Obrik
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	12 Kali
Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	5 OPD
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00 %
Inventarisasi Temuan Pengawasan	42 OPD
Review Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	100,00 %
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	10 Orang
Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	1 Laporan
<b>Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	
Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan	42 OPD
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	42 OPD
Gelar Temuan Hasil Pengawasan	57 LHP

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD adalah terjadinya ketidak signifikan antara Renstra/Renja dengan APBD Kabupaten Solok Selatan yang disebabkan oleh adanya pengaruh rasionalisasi APBD.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengajukan atau memunculkan kembali kegiatan tersebut pada tahun mendatang.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 mendapat opini dari BPK RI adalah WTP, salah satu peran Inspektorat Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu dengan melalui kegiatan Reviu, sehingga LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Berkurangnya Jumlah Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

Dari jumlah rekomendasi atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan kondisi tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

### JUMLAH TEMUAN :

No	APIP	Jumlah Temuan	Yang Telah ditindaklanjuti	Jumlah Yang Belum ditindaklanjuti
1	BPK	871	813	58
2	Inspektorat Kabupaten Solok Selatan	421	160	261

### JUMLAH NILAI KERUGIAN :

No	APIP	Nilai Kerugian (Rp)	Yang telah ditindaklanjuti (Rp)	Yang Belum ditindaklanjuti (Rp)
1	BPK	53.760.471.484,37	51.560.589.484,82	2.199.881.999,55
2	Inspektorat Kabupaten Solok Selatan			

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

### Tugas Pokok dan Fungsi



Inspektorat Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan Program Pengawasan.
2. Perumusan Program Pengawasan.
3. Perumusan Kebijakan dan fasilitas pengawasan.
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### **Sumber Daya Manusia / Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil yang optimal dalam penerapan sesuai dengan ilmu yang didapatkan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

#### **Sarana dan Prasarana**

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan salah satunya adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, Pelaksanaan Rakorwas tersebut diikuti oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan bersama Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya se-Indonesia, dalam rangka koordinasi dan sinergi program dan kegiatan sesama Inspektorat se-Indonesia, termasuk dalam hal menghadapi kendala-kendala yang dihadapi didalam melaksanakan tugas demi untuk pencapaian kinerja Inspektorat untuk kedepannya.

Permasalahan yang dihadapi didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas/operasional dan yang paling berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah keterbatasan



anggaran sehingga masih ada obrik yang belum dimasukan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan adalah keterbatasan SDM yang dinilai masih kurang, seperti dalam melaksanakan suatu audit harus dibekali dengan pengetahuan atau dibutuhkannya SDM yang handal.

Pengaruh pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah adanya tuntutan Kabupaten Solok Selatan menjadi Good and Clean Governance (Pemerintahan yang baik dan bersih) sehingga menjadikan Insprktorat harus bekerja optimal dalam melakukan meningkatkan kinerja pelayanannya terhadap semua OPD khususnya dalam melakukan pembinaan.

#### **Tantangan dalam meningkatkan pelayanan adalah :**

1. Tutunan masyarakat atas Pengawasan Melekat (Waskat) terhadap Pemerintahan/ Aparatur untuk menciptakan “ Good and Clean Governance “
2. Masih banyak temuan yang belum diselesaikan oleh OPD
3. Adanya mutasi terhadap Aparatur Pengawasan

#### **Peluang dalam meningkatkan pelayanan adalah :**

1. Adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota
2. Adanya Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2015.
3. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
4. Adanya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susuna Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inpektorat
5. Adanya dukungan Bupati Solok Selatan
6. Tersedianya dana pada APBD Kabupaten Solok Selatan
7. Adanya koordinasi dengan instansi terkait
8. Adanya partisipasi informasi dan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Dalam menyusun rancangan awal RKPD, Inspektorat Kabupaten Solok Selatan merincikan berbagai kebutuhan yang dituangkan didalam Program dan Kegiatan.



Sebelum disusun telah dilakukan analisis kebutuhan, Analisa kebutuhan tersebut bertujuan agar dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, didalam perjalanannya Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telah tertuang didalam RKPD Kabupaten Solok Selatan.

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Didalam tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tidak memiliki program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, kecuali didalam hal penanganan kasus atau pengaduan masyarakat, Inspektorat masih memiliki kewenangan didalam melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pengawasan nasional pada hakekatnya merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya fungsi pengawasan yang efektif, setiap Institusi Pemerintah harus dilakukan pengawasan secara kontinyu agar Institusi tersebut dapat bekerja dengan optimal. Jika tidak dilakukan pengawasan maka akan muncul penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga akan terjadi kerugian Negara/Daerah.

Hal ini harus terlaksana antara Penyelenggara/pelaksana Pemerintah dengan Pengawasannya, artinya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD harus mendapat pengawasan dari Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang terdiri-dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pengawasan yang profesional terutama didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Inspektorat akan menggunakan segenap kemampuannya untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap OPD Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk setiap tahunnya dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan. PKPT tersebut disusun berdasarkan PKPT tahun sebelumnya, agar OPD sebagai Objek Pemeriksaan (Obrik) juga mendapat pembinaan secara berkala dari Inspektorat.

Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Solok Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi mandat oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah di bidang Pengawasan, selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi dan Pembinaan Aparatur Pengawasan secara berkelanjutan sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih, serta pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip Ekonomis, Efisien, Efektif dan Transparan.



### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan diadopsi dari Renstra Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dari Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

#### Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Koordinasi Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>* Meningkatkan perencanaan pengawasan</li><li>* Meningkatkan kualitas hasil pengawasan</li><li>* Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya perencanaan pengawasan</li><li>b. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan.</li><li>c. Meningkatnya koordinasi pengawasan yang komprehensif.</li></ul>
2	Meningkatkan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>1). Menurunkan tingkat kesalahan</li><li>2). Mengurangi tingkat penyelewengan</li><li>3). Menertibkan tata kelola administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Berkurangnya tingkat kesalahan.</li><li>b. Berkurangnya tingkat penyelewengan.</li><li>c. Tertibnya tata kelola administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.</li></ul>
3.	Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional	Meningkatnya kemampuan dan wawasan aparatur pengawasan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pemberantasan korupsi, salah satu caranya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap semua OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Solok Selatan memiliki Jumlah **7 Program dan 36 Kegiatan**, namun ada **2 program yang menjadi prioritas**, yaitu :



**1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH, yang diaplikasikan kedalam 7 (Tujuh) kegiatan pokok, yaitu ;**

1. Pelaksanaan pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
2. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus/Kasus)
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4. Audit PAD
5. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH :
  - a. Monitoring Pelaksanaan Program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada setiap SKPD
  - b. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa/Nagari
  - c. Inventarisasi Temuan Pengawasan
7. Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan :
  - a. Reviu RPJMD
  - b. Reviu RKPD
  - c. Reviu RKA SKPD
  - d. Reviu LKPD
  - e. Evaluasi-Reviu Laporan Kinerja SKPD
  - f. Reviu Penyerapan Anggaran
  - g. Reviu Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ)
  - h. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Reviu)

**2. Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, yang diaplikasikan kedalam 5 (lima) kegiatan pokok, yaitu ;**

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Gelar Temuan Hasil Pengawasan
4. Evaluasi SPIP
5. LHKPN

Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telah merumuskan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan prakiraan main tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut :



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pengawasan .

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Solok Selatan beserta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat dan transparan.



## Rancangan Awal RKPD

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
						Rp
1	2	3	4	5		6
						3,265,630,000
						899,130,000
I	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersedianya kebutuhan perkantoran</b>			
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Solsel	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	3,000,000
02	Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Solsel	Tersedianyajasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	17,000,000
03	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Solsel	Tersedianya tenaga pendukung administrasi keuangan	Bulan	12	80,880,000
04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Solsel	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Bulan	12	36,000,000
05	Penyediaan Alat tulis kantor	Kab. Solsel	Tersediannya ATK	Bulan	12	50,000,000
06	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Solsel	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	35,000,000
07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Solsel	tersedianya komponen instalasi listrik	Bulan	12	6,000,000
08	Penyediaan makanan dan minumam rapat	Kab. Solsel	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu pemeriksaan dari BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi	Bulan	12	18,000,000
09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	Kab. Solsel	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Bulan	12	600,000,000



10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	Kab. Solsel	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	Bulan	12	48,000,000
11	Penyediaan Bahan dan Peralatan Kebersihan	Kab. Solsel	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	Bulan	12	5,250,000
II	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>516,000,000</b>
01	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Solsel	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,			200,000,000
			Komputer	Unit	2	
			Laptop	Unit	8	
			Lemari Arsip	Unit	10	
			Meja biro	Unit	25	
			Meja 1/2 biro	Unit	30	
			Kursi	Unit	30	
			AC Split	Unit	0	
			Logo dan Merk Kantor	Set	1	-
			Rak besi arsip	Set	0	-
			PABX	Set	0	
			CCTV	Set	0	
			Kursi Tunggu	Set	0	
			Bendera dan Tiang bendera	Set	1	
				Unit		
02	Pengadaan kendaraan dinas roda dua	Kab. Solsel	tersedianya kendaraan dinas roda dua untuk operasional sebanyak 4	Unit	4	150,000,000
03	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kab. Solsel	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional jabatan	Bulan	12	55,000,000
04	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Operasional	Kab. Solsel	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kantor	Bulan	12	100,000,000
05	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Solsel	tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	4,000,000



06	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kab. Solsel	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	7,000,000
III	<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Tersedianya pakaian kerja aparatur</b>			<b>48,000,000</b>
01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Solsel	tersedianya pakaian dinas, olahraga dan Pakaian lapangan sebanyak 40stel	Stel	0	48,000,000
IV	<b>Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase ketersediaan Auditor dan P2UPD</b>			<b>55,000,000</b>
01	Diklat pembentukan dan penjenjangan auditor dan P2UPD	Kab. Solsel	Terbentuknya Aparatur Pemeriksa yang memiliki sertifikat	Orang	17	55,000,000
V	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian</b>		<b>Peningkatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>		<b>WDP</b>	<b>155,000,000</b>
			<b>Nilai Lakip</b>		<b>CC</b>	
01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Reviu)	Kab. Solsel	Tersusunnya laporan Hasil reviw LKPD	Laporan	1	75,000,000
02	Review LPPD dan LKPJ	Kab. Solsel	Tersusunnya laporan Hasil reviw LPPD dan LKPJ	Laporan	-	25,000,000
03	Evaluasi-reviu laporan kinerja SKPD	Kab. Solsel	Tersusunnya laporan Hasil reviw laporan kinerja SKPD	Laporan	1	55,000,000
V	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>Persentase jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>	<b>1,230,000,000</b>
01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Jumlah obrik yang diperiksa	obrik	72	625,000,000
02	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus/Kasus)	Kab. Solsel	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	Persen	80.00	100,000,000
03	Pengendalian manajemen pelaksanaan	Kab. Solsel	jumlah laporan monitoring kegiatan SKPD	laporan	0	100,000,000



	kebijakan KDH		jumlah laporan monitoring Dana Nagari (DD dan ADD)	laporan	-	
					1	30,000,000
05	Inventarisasi temuan pengawasan	Kab. Solsel	Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	Dokumen		150,000,000
06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Persen	90	20,000,000
07	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kab. Solsel	Jumlah SKPD yang diaudit	SKPD	0	80,000,000
08	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Kab. Solsel	Persentase penyelesaian TPKD pada OPD	Persen	0	25,000,000
09	Reviu RPJMD	Kab. Solsel	Sinkronisasi dokumen RPJMD dengan ketentuan RPJPD dan Visi Misi Bupati			25,000,000
10	Review Renstra	Kab. Solsel	Sinkronisasi dokumen dokumen Renstra OPD dengan RPJMD			25,000,000
11	Reviu RKPD	Kab. Solsel	Sinkronisasi dokumenn RKPD dengan RPJMD		95	25,000,000
12	Reviu KUA-PPAS	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen KUA-PPAS dengan RKPD		95	25,000,000
13	Reviu RKA SKPD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RKA - OPD dengan KUA-PPAS		95	25,000,000
<b>VI</b>	<b>Pengendalian Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten</b>		<b>Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>135,000,000</b>
01	Reviu RPJMD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan ketentuan sebesar 80%	dokumen	-	27,000,000
02	Review Renstra	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen Renstra OPD dengan RPJMD sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000
03	Reviu RKPD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra dan Renja sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000
04	Reviu KUA-PPAS	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen KUA-PPAS dengan RKPD sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000
05	Reviu RKA SKPD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RKA - OPD dengan KUA-PPAS sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000



VII	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP)		II dengan catatan	227,500,000
01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kab. Solsel	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan Substantif	Persen	32.00	100,000,000
			Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	Persen	100	
02	Monitoring dan Evaluasi spip	Kab. Solsel	Meningkatnya Level SPIP	III	Level	75,000,000
03	LHKPN	Kab. Solsel	Meningkatnya LAPORAN lhkpn	100	Persen	30,000,000
04	Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional (PAK)	Kab. Solsel	Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) setiap pejabat fungsional		100	10,000,000
05	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	Kab. Solsel	Meningkatnya Level Inspektorat selaku APIP	Tingkatan	II-	12,500,000



9	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah SKPD yang diaudit	Jumlah SKPD yang diaudit	Kab. Solsel	Kab. Solsel	SKPD	3	SKPD	3	15,000,000	15,000,000		APBD/DAU
5	Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD P 2019)		Jumlah SKPD yang diaudit		Kab. Solsel			SKPD	33		30,000,000	30,000,000	APBD/DAU
3	Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD 2020)		Jumlah SKPD yang diaudit		Kab. Solsel			SKPD	33		30,000,000	30,000,000	APBD/DAU
12	Revisi Rencana kerja anggaran SKPD (RKA P 2019)	Jumlah SKPD yang direvisi	Jumlah SKPD yang direvisi	Kab. Solsel	Kab. Solsel	SKPD	33	SKPD	33	20,000,000	30,000,000	10,000,000	APBD/DAU
13	Revisi Rencana kerja anggaran SKPD (RKA 2020)		Jumlah SKPD yang direvisi		Kab. Solsel			SKPD	33		30,000,000	30,000,000	APBD/DAU
15	Inventarisasi temuan pengawasan	Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan	Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Dokumen	1	Dokumen	1	5,000,000	5,000,000		APBD/DAU
16	Pelaksanaan Penyelesaian kerugian Daerah (TPKD)	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Persen	90	Persen	90	25,000,000	175,000,000	150,000,000	APBD/DAU
17	Review Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Pelaporan	Jumlah SKPD yang direvisi	Jumlah SKPD yang direvisi	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Persen	100	Persen	90	130,000,000	130,000,000		APBD/DAU
VII	<b>Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP)</b>	<b>Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP)</b>				III Penuh		III Penuh	<b>135,000,000</b>	<b>135,000,000</b>		
01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan Substantif/ PKS	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan Substantif/ PKS	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Orang	8.00	Orang	8.00	90,000,000	90,000,000		APBD/DAU
04	Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional (PAK)	Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) setiap pejabat fungsional	Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) setiap pejabat fungsional	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Orang	15	Orang	15	10,000,000	10,000,000		APBD/DAU
05	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	Meningkatnya Level Inspektorat selaku APIP	Meningkatnya Level Inspektorat selaku APIP	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Tingkatan	III	Tingkatan	III	35,000,000	35,000,000		APBD/DAU
VIII	<b>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan</b>	<b>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan</b>	<b>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan</b>							<b>81,000,000</b>	<b>81,000,000</b>		
01	Monitoring dan Evaluasi SPIP	Meningkatnya Level SPIP	Meningkatnya Level SPIP	Kab. Solsel	Kab. Solsel	III Penuh	Level	III Penuh	Level	35,000,000	35,000,000		APBD/DAU
02	Evaluasi penerapan Standar pelayanan Minimal	Terlaksana Evaluasi penerapan Standar pelayanan Minimal	Terlaksana Evaluasi penerapan Standar pelayanan Minimal	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	1,000,000	1,000,000		APBD/DAU
03	Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya Pemberantasan Pungutan Liar	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	25,000,000	25,000,000		APBD/DAU
04	LHKPN	Meningkatnya LAPORAN LHKPN	Meningkatnya LAPORAN LHKPN	Kab. Solsel	Kab. Solsel	206	Orang	206	Orang	20,000,000	20,000,000		
Jumlah										<b>1,838,966,100</b>	<b>2,238,966,100</b>	<b>400,000,000</b>	

Padang aro, 10 Juli 2019  
Plt. Inspektur  
Kabupaten Solok Selatan

Gusti Andri, SE  
Nip. 19660831 199202 1 001



**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

OPD : INSPEKTORAT		Indikator		Lokasi		Target Capaian				Kebutuhan Pagu Indikatif			Sumber Dana
No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	AWAL	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Selisih	
								545,577,500	545,577,500				
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan perkantoran	Tersedianya kebutuhan perkantoran	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	3,000,000	3,000,000		APBD/DAU
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	17,000,000	17,000,000		APBD/DAU
02	Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyajasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianyajasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	80,880,000	80,880,000		APBD/DAU
03	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga pendukung administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pendukung administrasi keuangan	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	36,000,000	36,000,000		APBD/DAU
04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	48,847,500	48,847,500		APBD/DAU
05	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersediannya ATK	Tersediannya ATK	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	35,100,000	35,100,000		APBD/DAU
06	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	6,000,000	6,000,000		APBD/DAU
07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12		18,000,000		APBD/DAU
08	Penyediaan makanan dan minuman rapat	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu pemeriksaan dari BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu pemeriksaan dari BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	18,000,000	247,500,000		APBD/DAU
09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	247,500,000	48,000,000		APBD/DAU
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	48,000,000	5,250,000		APBD/DAU
11	Penyediaan Bahan dan Peralatan Kebersihan	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	5,250,000			
II	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur					195,514,000	195,514,000				APBD/DAU
01	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Tahun	12	Bulan	12	50,000,000	50,000,000		APBD/DAU
03	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional jabatan	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	55,000,000	55,000,000		APBD/DAU
04	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kantor	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kantor	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	79,514,000	79,514,000		APBD/DAU
05	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Bulan	12	Bulan	12	11,000,000	11,000,000		APBD/DAU
								1,424,600	1,424,600				
III	Peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian kerja aparatur	Tersedianya pakaian kerja aparatur										APBD/DAU
01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian dinas, olahraga dan Pakaian lapangan sebanyak 40stel	tersedianya pakaian dinas, olahraga dan Pakaian lapangan sebanyak 40stel	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Stel	40	Stel	40	1,424,600	1,424,600		
IV	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan Auditor dan P2UPD	Persentase ketersediaan Auditor dan P2UPD							20,000,000	20,000,000		APBD/DAU
01	Diklat pembentukan dan penjenjangan auditor dan P2UPD	Terbentuknya Aparatur Pemeriksa yang memiliki sertifikat	Terbentuknya Aparatur Pemeriksa yang memiliki sertifikat	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Orang	17	Orang	17	20,000,000	20,000,000		
V	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan	tercapainya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	tercapainya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &							60,000,000	60,000,000		APBD/DAU
01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Hasil capaian ikhtisar	Tersusunnya laporan Hasil capaian ikhtisar	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Laporan	1	Laporan	1	25,000,000	25,000,000		APBD/DAU
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan Hasil LKPD OPD	Tersusunnya laporan Hasil LKPD OPD	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Laporan	1	Laporan	1	35,000,000	35,000,000		
V	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan	Persentase Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan			Persen	30	Persen	30	800,450,000	1,200,450,000		
01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah obrik yang diperiksa	Jumlah obrik yang diperiksa			obrik	65	obrik	72	450,000,000	550,000,000	100,000,000	APBD/DAU
02	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus/Kasus)	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	Kab. Solsel	Kab. Solsel	Persen	80.00	Persen	80.00	65,450,000	65,450,000		APBD/DAU
06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti			Persen	90	Persen	90	90,000,000	140,000,000	50,000,000	



VII	<b>Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>		<b>Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP)</b>		<b>II dengan catatan</b>	<b>227,500,000</b>
01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kab. Solsel	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan Substantif	Persen	32.00	100,000,000
			Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	Persen	100	
02	Monitoring dan Evaluasi spip	Kab. Solsel	Meningkatnya Level SPIP	III	Level	75,000,000
03	LHKPN	Kab. Solsel	Meningkatnya LAPORAN lhkpn	100	Persen	30,000,000
04	Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional (PAK)	Kab. Solsel	Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) setiap pejabat fungsional		100	10,000,000
05	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	Kab. Solsel	Meningkatnya Level Inspektorat selaku APIP	Tingkatan	II-	12,500,000



III	Peningkatan disiplin aparatur		Tersedianya pakaian kerja aparatur			48,000,000
01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Solsel	tersedianya pakaian dinas, olahraga dan Pakaian lapangan sebanyak 40stel	Stel	0	48,000,000
IV	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		Persentase ketersediaan Auditor dan P2UPD			55,000,000
01	Diklat pembentukan dan penjenjangan auditor dan P2UPD	Kab. Solsel	Terbentuknya Aparatur Pemeriksa yang memiliki sertifikat	Orang	17	55,000,000
V	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian		Peningkatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		WDP	155,000,000
			Nilai Lakip		CC	
01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Reviu)	Kab. Solsel	Tersusunnya laporan Hasil reviw LKPD	Laporan	1	75,000,000
02	Review LPPD dan LKPJ	Kab. Solsel	Tersusunnya laporan Hasil reviw LPPD dan LKPJ	Laporan	-	25,000,000
03	Evaluasi-reviu laporan kinerja SKPD	Kab. Solsel	Tersusunnya laporan Hasil reviw laporan kinerja SKPD	Laporan	1	55,000,000
V	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Persentase jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan	Persen	30	1,230,000,000
01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Jumlah obrik yang diperiksa	obrik	72	625,000,000
02	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus/Kasus)	Kab. Solsel	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	Persen	80.00	100,000,000
03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kab. Solsel	jumlah laporan monitoring kegiatan SKPD	laporan	0	100,000,000
			jumlah laporan monitoring Dana Nagari (DD dan ADD)	laporan	-	
05	Inventarisasi temuan pengawasan	Kab. Solsel	Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	Dokumen	1	30,000,000
06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Persen	90	150,000,000
07	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kab. Solsel	Jumlah SKPD yang diaudit	SKPD	0	20,000,000
08	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Kab. Solsel	Persentase penyelesaian TPKD pada OPD	Persen	0	80,000,000
09	Reviu RPJMD	Kab. Solsel	Sinkronisasi dokumen RPJMD dengan ketentuan RPJPD dan Visi Misi Bupati			25,000,000
10	Review Renstra	Kab. Solsel	Sinkronisasi dokumen dokumen Renstra OPD dengan RPJMD			25,000,000
11	Reviu RKPD	Kab. Solsel	Sinkronisasi dokumenn RKPD dengan RPJMD		95	25,000,000
12	Reviu KUA-PPAS	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen KUA-PPAS dengan RKPD		95	25,000,000
13	Reviu RKA SKPD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RKA - OPD dengan KUA-PPAS		95	25,000,000
VI	Pengendalian Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten		Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Persen	-	135,000,000
01	Reviu RPJMD	Kab. Solsel	Persentase keseuai dokuem RPJMD dengan ketentuan sebesar 80%	dokumen	-	27,000,000
02	Review Renstra	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen Renstra OPD dengan RPJMD sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000
03	Reviu RKPD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra dan Renja sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000
04	Reviu KUA-PPAS	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen KUA-PPAS dengan RKPD sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000
05	Reviu RKA SKPD	Kab. Solsel	Persentase kesesuaian dokumen RKA - OPD dengan KUA-PPAS sebesar 90%	dokumen	-	27,000,000



# Rancangan Awal RKPD

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
						Rp
				5		6
1	2	3	4			3,265,630,000
I	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersedianya kebutuhan perkantoran</b>			899,130,000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Solsel	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	3,000,000
02	Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Solsel	Tersedianyajasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	17,000,000
03	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Solsel	Tersedianya tenaga pendukung administrasi keuangan	Bulan	12	80,880,000
04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Solsel	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Bulan	12	36,000,000
05	Penyediaan Alat tulis kantor	Kab. Solsel	Tersediannya ATK	Bulan	12	50,000,000
06	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kab. Solsel	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	35,000,000
07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Solsel	tersedianya komponen instalasi listrik	Bulan	12	6,000,000
08	Penyediaan makanan dan minumam rapat	Kab. Solsel	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu pemeriksaan dari BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi	Bulan	12	18,000,000
09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	Kab. Solsel	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Bulan	12	600,000,000
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	Kab. Solsel	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	Bulan	12	48,000,000
11	Penyediaan Bahan dan Perlatan Kebersihan	Kab. Solsel	Tersedianya bahan dan perelatan kebersihan	Bulan	12	5,250,000
II	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			516,000,000
01	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Solsel	Teresedianya peralatan dan perlengkapan kantor,			200,000,000
			Komputer	Unit	2	
			Laptop	Unit	8	
			Lemari Arsip	Unit	10	
			Meja biro	Unit	25	
			Meja 1/2 biro	Unit	30	
			Kursi	Unit	30	
			AC Split	Unit	0	
			Logo dan Merk Kantor	Set	1	-
			Rak besi arsip	Set	0	-
			PABX	Set	0	
			CCTV	Set	0	
			Kursi Tunggu	Set	0	
			Bendera dan Tiang bendera	Set	1	
				Unit		
02	Pengadaan kendaraan dinas roda dua	Kab. Solsel	tersedianya kendaraan dinas roda dua untuk operasional sebanyak 4	Unit	4	150,000,000
03	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kab. Solsel	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional jabatan	Bulan	12	55,000,000
04	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Operasional	Kab. Solsel	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kantor	Bulan	12	100,000,000
05	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Solsel	tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	4,000,000
06	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Solsel	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	7,000,000